

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP GUGATAN
YANG DITOLAK KARENA CACAT FORMIL DALAM STUDI PUTUSAN
NO. 55/PDT.G/2019/PN BLI**

Oleh

Putu Maysi Merta Ningsih, NIM 2214101145

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum acara perdata terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena cacat formil berupa *plurium litis consortium* dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bangli. Fokus utama penelitian ini terletak pada problematika normatif mengenai kekaburan pengaturan syarat formil gugatan, khususnya terkait kekurangan pihak (*error in persona*), serta ketidaktegasan rujukan normatif yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bangli. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum acara perdata, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan cacat formil karena *plurium litis consortium* belum sepenuhnya didasarkan pada rujukan normatif yang jelas dan sistematis, sehingga berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu, tidak adanya pengaturan eksplisit dalam RBg mengenai *error in persona* dan kekurangan pihak menyebabkan terbukanya ruang multitafsir dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan sebagai bahan evaluasi bagi hakim, praktisi hukum, dan pembentuk undang-undang guna mendorong pembaruan hukum acara perdata yang lebih unifikatif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: Cacat Formil; Gugatan Perdata; Putusan Pengadilan.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION ON LAWSUITS
DISMISSED DUE TO FORMAL DEFECTS: A STUDY OF DECISION NO.
55/PDT.G/2019/PN BLI**

By

Putu Maysi Merta Ningsih, NIM 2214101145

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research aims to juridically analyze the procedural law regulations regarding lawsuits declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) due to formal defects in the form of plurium litis consortium, as seen in Decision Number 55/Pdt.G/2019/PN Bangli. The primary focus of this study lies in the normative problematic regarding the obscurity of formal requirements for a lawsuit, specifically concerning the joinder of parties (error in persona), and the lack of firm normative references used by judges in the legal considerations of the decision. This study is a normative legal research employing the statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary sources, including relevant legislation such as Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), and Decision Number 55/Pdt.G/2019/PN Bangli. Secondary legal materials include doctrines, legal literature, scientific journals, and expert opinions on civil procedural law, while tertiary materials include legal dictionaries and encyclopedias. Data collection was conducted through literature study, with qualitative analysis performed via systematic and argumentative legal interpretation. The results indicate that the judge's consideration in declaring the lawsuit formally defective due to plurium litis consortium was not fully based on clear and systematic normative references, potentially contradicting Article 50 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009. Furthermore, the absence of explicit regulations in the RBg regarding error in persona and the joinder of parties creates space for multiple interpretations in judicial practice. Therefore, this research serves as an evaluation for judges, legal practitioners, and legislators to encourage civil procedural law reforms that are more unificative, provide legal certainty, and guarantee substantive justice for seekers of justice.

Keywords: *Formal Defect; Civil Lawsuit; Court Decision.*